



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Skripsi

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM
PEMBERITAAN PERS INDONESIA

B. Sub Judul

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Sisi
Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* Periode
Maret-Juli 2007

C. Latar Belakang Masalah

Keinginan Iran untuk tetap mengusahakan kegiatan pengayaan uraniumnya
berbuah pada dikeluarkannya Resolusi nomor 1747 oleh Dewan Keamanan PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa). Resolusi nomor 1747 ini dibuat sebagai peringatan
susulan dari Resolusi sebelumnya, nomor 1737, yang dikeluarkan Desember 2006
silam.

Dewan Keamanan PBB membuat Resolusi nomor 1747 untuk lebih menekan
Iran agar menghentikan pengayaan uraniumnya. Resolusi ini memuat sanksi yang
lebih keras daripada Resolusi sebelumnya. Resolusi yang baru ini mulai dibahas
oleh Dewan Keamanan PBB sejak 21 Maret 2007 (*Kompas*, 22 Maret 2007).

Hingga tanggal 24 Maret 2007, kelima belas anggota Dewan Keamanan PBB telah menyetujui secara bulat Resolusi tersebut.

Resolusi 1747 berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata dari dan ke Iran, membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran, serta melarang semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan, dan pinjaman keuangan kepada Iran. Resolusi ini memberi tenggat waktu 60 hari bagi Iran untuk memenuhi Dewan Keamanan PBB atau akan menghadapi sanksi lebih jauh (*Kompas*, 3 April 2007).

Resolusi ini dikeluarkan karena Iran dianggap tidak mematuhi Resolusi nomor 1737 yang dikeluarkan 23 Desember 2006 silam. Resolusi 1737 berisi kewajiban Iran untuk menghentikan upaya pengayaan uranium dalam rangka pengembangan nuklir. Namun dalam jangka waktu 60 hari Iran tetap tidak menghentikan upaya pengayaan uranium itu. Iran berkeras untuk tetap mengembangkan nuklirnya, karena mereka berpendapat bahwa upaya itu hanyalah untuk kepentingan damai.

Kedudukan Indonesia yang masih tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ikut terusik dengan adanya pembahasan Resolusi 1747. Indonesia turut ambil bagian dalam proses pemungutan suara soal Resolusi ini. Pada awalnya Indonesia menolak Resolusi tersebut karena Indonesia percaya bahwa pembangunan nuklir Iran adalah untuk tujuan damai. Selain itu, hubungan Indonesia dengan Iran terjalin dengan baik selama ini. Terlebih lagi Indonesia dan Iran sama-sama negara Muslim. Namun keputusan Indonesia untuk menolak Resolusi 1747 pada akhirnya berubah menjadi dukungan. Dukungan Indonesia ini

mengacu kepada kepentingan Indonesia untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir. Pemerintah berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah ini seluruh anggota Dewan keamanan PBB perlu mencari solusi damai yang terbaik dan menghindari sanksi-sanksi yang nantinya akan melahirkan masalah baru.

Sikap Indonesia yang dianggap plin-plan memicu reaksi beragam di dalam negeri. Ada pihak yang mengecam, namun ada pula diantaranya yang menyatakan persetujuan terhadap keputusan Indonesia. Jelas saja keadaan ini menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi semakin menguat ketika pihak yang kontra menyatakan dengan lugas keinginan mereka, dan pihak yang pro tetap bersikukuh pada pendapat mereka. Kontroversi mengenai dukungan Indonesia atas Resolusi Iran ini berujung pada usulan interpelasi yang diajukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap hal-hal atau permasalahan yang belum dipahami sepenuhnya. Dengan adanya usulan interpelasi ini maka semakin terlihat jelas mana saja pihak-pihak yang berkonflik. Mereka yang tidak setuju dengan dukungan Indonesia terhadap Resolusi mengusulkan supaya dilakukan interpelasi guna meminta penjelasan dari pemerintah mengenai alasan pasti mengapa Indonesia mendukung disahkannya Resolusi untuk Iran. Sedangkan mereka yang sepakat dengan dukungan Indonesia merasa bahwa interpelasi tidak perlu dilakukan.

Permasalahan mengenai Resolusi nuklir Iran ini turut mengisi pemberitaan media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Media secara berturut-

turut menyajikan pemberitaan mulai dari pembahasan Dewan Keamanan PBB soal keputusan pembuatan Resolusi hingga pemberitaan mengenai pertentangan-pertentangan yang ada di dalam negeri berkaitan dengan keputusan Indonesia untuk mendukung disahkannya Resolusi ini. Penelitian ini khusus meneliti berita kontroversi yang terjadi di Indonesia seputar Resolusi PBB yang ditujukan bagi Iran.

Untuk lebih memahami cakupan peristiwa yang terkandung dalam kejadian ini ada tiga unsur yang dapat dijadikan acuan. Ketiga unsur ini menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual, yaitu medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan sarana wacana (*mode of discourse*). Medan wacana menunjuk pada hal yang terjadi; apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai sesuatu yang sedang terjadi di lapangan peristiwa. Pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita), seperti sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Sedangkan sarana wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, bagaimana media menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan dan pelibat, apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufemistik atau vulgar (Sobur, 2002: 148).

Dari pemberitaan kontroversi yang terjadi di Indonesia mengenai Resolusi 1747, dapat diidentifikasi bahwa *field of discourse* atau medan wacana yang diusung oleh media adalah dukungan Indonesia terhadap Resolusi nomor 1747 menuai kontroversi di dalam negeri. Para pembuat keputusan, dalam hal ini pemerintah, menilai bahwa pertentangan ini terjadi karena tidak dipahaminya isi

Resolusi secara utuh. Kontroversi terjadi ketika ada pihak yang tidak sepaham dengan alasan dukungan Indonesia.

Dalam situasi pro dan kontra ini lebih jauh media menunjuk para pelibat atau aktor yang ikut berperan di dalamnya (*tenor of discourse*). Dapat diidentifikasi lebih jauh siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Dari pemberitaan yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat dua kubu yang diciptakan oleh media, yaitu kubu pro Resolusi dan kubu kontra Resolusi.

Para legislator yang duduk kursi DPR menjadi pihak yang kontra dengan dukungan Indonesia terhadap Iran. Walaupun tidak seluruh anggota dewan bersikap kontra, namun separuh lebih suara telah menunjukkan adanya keinginan kuat untuk tidak sependapat dengan pemerintah yang mendukung Resolusi 1747. Mereka bersuara melalui media, dimana sebagian besar menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Indonesia. Para legislator menilai Indonesia telah berada di bawah tekanan Negara Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, sehingga sikap Indonesia yang awalnya menolak Resolusi 1747 pada akhirnya mendukung dan sepakat dengan Negara-negara lain yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB. Mereka juga menilai bahwa keputusan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak toleransi dengan Iran, yang notabene adalah sesama negara Muslim (*Kompas*, 27 Maret 2007). Mereka meminta seharusnya Indonesia tetap menolak Resolusi tersebut untuk menyatakan tenggang rasanya pada negara Iran. Keterlibatan para anggota DPR dalam masalah ini cukup besar. Hal ini terlihat dari menonjolnya sikap anggota DPR yang tidak setuju dengan dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747. Separuh anggota DPR meminta

penjelasan dari pemerintah berkaitan dengan keputusan pemerintah mendukung Resolusi PBB dengan mengusulkan hal interpelasi.

Pihak yang kedua adalah pemerintah atau eksekutif. Disini posisi pemerintah adalah sebagai pendukung Resolusi 1747. Pemerintah memilih sikap mendukung sebagai upaya nyata untuk memacu solusi damai dalam penyelesaian masalah Iran (*Kompas*, 29 Maret 2007). Pemerintah Indonesia menghendaki supaya para pendukung Resolusi tidak serta merta menjatuhkan sanksi yang berat kepada Iran, namun mencari alternatif solusi damai agar didapatkan keputusan yang menguntungkan seluruh pihak. Hal ini terlihat pada masukan Indonesia yang menginginkan adanya kawasan bebas nuklir di Timur Tengah (*Kompas*, 24 Maret 2007). Menyikapi kontroversi yang terjadi di dalam negeri, pihak-pihak yang berada di pihak pemerintah, atau dengan kata lain pro dengan Resolusi 1747, juga turut ambil bagian di media. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah dengan menjelaskan alasan mereka mendukung Resolusi 1747.

Selain di tingkat pejabat dan pemerintah, aksi pro dan kontra juga terjadi di tubuh masyarakat. Mereka yang kontra dengan keputusan Indonesia mendukung Resolusi menggelar aksi demo. Aksi demo ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Aksi ini di antaranya dilakukan oleh Laskar Umat Islam Surakarta di Solo, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Makassar, dan puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya. Mereka dengan tegas menentang sikap pemerintah Indonesia yang mendukung Resolusi 1747. Mereka juga meminta seluruh masyarakat internasional, khususnya negara-negara Islam, untuk memberi dukungan moral kepada Iran. Bagi mereka, Resolusi 1747

merupakan politik diskriminatif karena berbagai negara lain, termasuk Israel, bebas mengembangkan teknologi nuklir. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, seperti di Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya.

Kontroversi mengenai dukungan Indonesia atas Resolusi 1747 ini turut memeriahkan pemberitaan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Mau tidak mau, media pun ikut terlibat dalam situasi ini. Para petinggi dan pejabat baik yang pro maupun kontra menggunakan media sebagai tempat “bersuara”. Mereka menggunakan media sebagai corong untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapat dan gagasannya berkaitan dengan Resolusi Iran. Posisi media dalam kasus ini adalah sebagai ruang kompetisi bagi mereka yang terlibat dalam kontroversi. Media sebagai wadah kompetisi berjuang untuk bersikap netral, tidak condong ke salah satu pihak. Hal ini terlihat dari upaya media untuk memberikan ruang yang sama bagi yang pro maupun yang kontra.

Segi bahasa (*mode of discourse*), menunjukkan bagaimana media menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan situasi dan pelibat peristiwa. Bahasa dapat pula menjadi petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan pelibat dengan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu.

Sebuah berita tidak mungkin menyajikan seluruh fakta sosial yang ada dalam masyarakat dalam halaman surat kabar yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ada proses seleksi yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang disajikan. Atau bahkan seleksi ini dilakukan terhadap apakah sebuah berita akan diangkat atau tidak. Maka wajar jika banyak pihak meragukan adanya objektivitas dalam sebuah berita. Objektivitas sendiri adalah bagaimana sebuah berita mampu dipisahkan

antara opini dan fakta yang ada dan bagaimana sebuah berita mampu berada pada posisi netral sehingga nantinya berita tidak terkesan memihak kepada salah satu pihak.

Menurut konsepsi “baku” etika jurnanisme, dalam pemberitaan konflik, atau dalam pemberitaan bermuatan kontroversi, media yang diwakili oleh jurnalis dituntut berada dalam “situasi tengah” antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Beberapa pandangan menegaskan bahwa tugas jurnalis yang utama adalah menjalankan profesinya secara independen dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Jurnalis tidak boleh memihak salah satu pihak atau hanya menyuarakan pihak tertentu, dan menafikan keberadaan pihak yang lain. Oleh karena itu, jurnalis tidak boleh membawa kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Semua pihak memiliki hak yang sama atas akses informasi. Pendek kata, peran ideal seorang jurnalis dalam memberitakan konflik adalah menjalankan tugas profesional. Saat bertugas, jurnalis memiliki komitmen untuk mencari berita dan menginformasikannya kepada pembaca sesuai standar teknis dan etika jurnalistik. Untuk memenuhi tuntutan profesionalisme itu, sekali lagi, jurnalis harus selalu menjaga sikap objektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga berada dalam posisi independen (Rahayu, 2006:132)

Bagaimana dengan *Kompas* dan *Republika*? Kedua surat kabar ini dipilih dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki latar belakang sejarah dan orientasi yang berbeda. *Kompas* dan *Republika* merupakan surat kabar nasional yang mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri.

Kompas adalah harian nasional dengan oplah dan sirkulasi terbesar di Indonesia. Didirikan oleh dua jurnalis profesional yakni P.K.Ojong dan Jacob Oetama, dengan inisiatif dari partai Katolik untuk memberikan ruang kepada umat Katolik untuk “bersuara”. Surat kabar bermotto Amanat Hati Nurani Rakyat ini terbit pertama kali pada 28 Juni 1965. Menurut David T.Hill (1995), *Kompas* menduduki peringkat kedua di seluruh Asia Tenggara dengan jumlah pembaca terdidik 3.120.000 di seluruh Indonesia.

Selama rentang waktu ini *Kompas* telah mencapai suksesnya sebagai surat kabar, yakni sukses dalam mengembangkan diri menjadi suatu pribadi kebanggaan nasional, sukses sebagai suatu harian yang tinggi kualitasnya, besar kuantitasnya, dan terpercaya profesionalismenya, serta sukses sebagai suatu bisnis. Sebagai koran harian, *Kompas* bisa disebut *the giant newspaper* yang tidak bisa ditantang oleh koran manapun sejauh ini (Sadono, 1996: 12).

Harian yang berdiri di bawah naungan Kelompok Kompas-Gramedia ini seringkali mendapat label nasionalis-sekuler, namun juga tidak lepas dari label koran yang berafiliasi nasional. Namun dalam pemberitaannya *Kompas* berusaha menampilkan objektivitasnya berkenaan dengan visi *Kompas* yang ingin memberikan perhatian dan mewujudkan kedilan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan dalam menghadapi berbagai kekuatan kepentingan dan kekuasaan, *Kompas* dikatakan selalu berada pada jalan tengah sebagaimana yang dikatakan Ketua Litbang *Kompas*, Daniel Dakhidae:

(policy *Kompas*)... tentu saja di tengah. Tidak memandang kiri dan kanan. Lebih independen, tidak menggebu-gebu. Semua sekarang naik di atas ombak perubahan. Persoalannya siapa dengan gaya bagaimana terserah... (Nugraha, 1999:4)

Sedangkan *Republika* merupakan koran nasional yang usianya masih sangat muda. *Republika* terbit perdana pada 4 Januari 1993, diterbitkan oleh PT Abdi Bangsa, suatu yayasan yang dikenal mempunyai aktivitas menghimpun dana bagi program-program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Harian *Republika* mempunyai visi dan misi untuk menjadi perusahaan media terpadu berskala nasional yang dikelola secara profesional Islami sehingga berpengaruh dalam mencerdaskan bangsa, mengembangkan kebudayaan, serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia baru

David T.Hill (1995) mengatakan bahwa *Republika* didirikan sebagai suatu langkah untuk memberikan nuansa baru surat kabar di Indonesia yang selama ini didominasi kalangan nonmuslim. Tendensi ideologis-politis ini muncul, ketika ICMI mengidentifikasi “musuh bersama” yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang cenderung menutup-nutupi kegiatan-kegiatan Islam secara profesional.

Dari segi prospek dan potensi pembacanya, pelanggan harian *Republika* cukup luas dan telah menyebar ke seluruh kota-kota di tanah air. Sehingga *image* bahwa harian umum *Republika* sebagai surat kabar pembawa aspirasi umat Islam cukup jelas dan kental, hal ini dibuktikan juga oleh sebagian besar pembaca *Republika*, yaitu sebanyak 90 % adalah umat Islam (www.republika.com). Bahkan David T.Hill mengkategorikan sebagai surat kabar Islam (*Islamic media*), selain harian *Abadi* dan *Pelita* (Hasrulah,2001:15).

Sebagai surat kabar yang lahir dari lingkungan Islam, maka *Republika* tentu mempunyai formula khusus dalam menyatukan ke-Islamannya dengan pemberitaan. Dalam kenyataannya *Republika* memang telah menemukan formulasi yang pas dalam menyatukan ke-Islaman dan pemberitaan. Seringkali media ini mampu menawarkan *angle* yang berbeda dalam mengulas sebuah permasalahan. Nafas Islam dalam *Republika* ditampilkan secara halus dalam beraneka macam berita, baik berita politik, pendidikan, bahkan olahraga. Tetapi nafas ke-Islaman lebih terasa bila *Republika* meliput kasus-kasus yang sensitif dengan Islam.

Hingga saat ini *Kompas* dan *Republika* telah berkembang menjadi koran yang besar dengan sebaran pembaca yang luas. Banyaknya khalayak *Kompas* dan *Republika* dalam skala nasional menuntut kedua koran ini untuk memberikan pemberitaan yang berkualitas bagi pembacanya.

Penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana surat kabar mampu mewujudkan objektivitas sebagai kisi-kisi etis dalam memproduksi sebuah berita. Berita-berita yang terkait dengan kontroversi Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi atas Iran nantinya akan diteliti menggunakan sisi objektivitas. Mengingat prinsip objektivitas merupakan poin penting yang harus dilaksanakan dan dianut sepenuhnya oleh institusi pers.

Dari keseluruhan penjelasan diatas, peneliti memfokuskan pengamatan dengan analisis terhadap isi berita yang ditinjau dari sisi objektivitas berita terkait dengan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi 1747 pada dua surat kabar nasional, yaitu *Kompas* dan *Republika* periode Maret-April 2006.

D. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah :

Bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran berita pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007?

E. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- Sebagai salah satu sumber informasi mengenai penggunaan prinsip objektivitas dalam suatu berita
- Dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema atau metode yang sama, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan
- Sebagai media latihan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian

G. Kerangka Teori

Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teori objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl, karena penelitian ini memfokuskan pada pengamatan objektivitas berita. Teori pendukung lainnya adalah mengenai konstruksi realitas media. Teori konstruksi realitas media digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dengan pemikiran bahwa proses konstruksi realitas yang terjadi dalam setiap produksi berita dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Konstruksi realitas terjadi karena banyaknya kepentingan dan hal-hal lain yang melingkupi institusi media.

1. Objektivitas berita

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan prinsip objektivitas, khususnya untuk mengetahui bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran, maka peneliti menggunakan perspektif objektivitas. McQuail mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk melihat profesionalitas media adalah dengan mengukur objektivitas media yang mencerminkan aktualisasi nilai dan presentasi media.

Objektivitas, dalam arti sempit maupun luas, merupakan sarana bagi sebuah tujuan. Objektivitas merupakan metode untuk menghadirkan gambaran dunia yang sedapat mungkin jujur dan cermat dalam batas-batas praktik jurnalistik (Rivers dan Mathews, 1994: 105).

Namun upaya menghadirkan objektivitas itu sendiri merupakan sebuah perjuangan. Dalam sistem media yang memiliki keanekaragaman eksternal,

terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak, meskipun informasi tersebut harus bersaing dengan sumber informasi lain yang menyatakan dirinya objektif. Bagaimanapun juga, hanya sedikit (kalaupun ada) media –apapun tujuan dan pernyataan dirinya- yang dapat terbebas sepenuhnya dari tuduhan bahwa media itu tidak sepenuhnya objektif (McQuail, 1991: 130-131).

Tujuan dari proses jurnalistik adalah melaporkan kebenaran. Tugas ini bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, mengingat banyak kepentingan yang ikut “berbicara”, sehingga mempengaruhi bentuk kebenaran yang disampaikan. Hal itu terjadi selama proses pembentukan berita, mulai sejak wartawan mengumpulkan fakta di lapangan, memilih narasumber yang akan diwawancarai, pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber, bagaimana fakta tersebut ditulis untuk menjadi sebuah berita, bagian mana yang ditonjolkan dan mana yang diabaikan, hingga saat redaktur melakukan penyuntingan dan pemuatan.

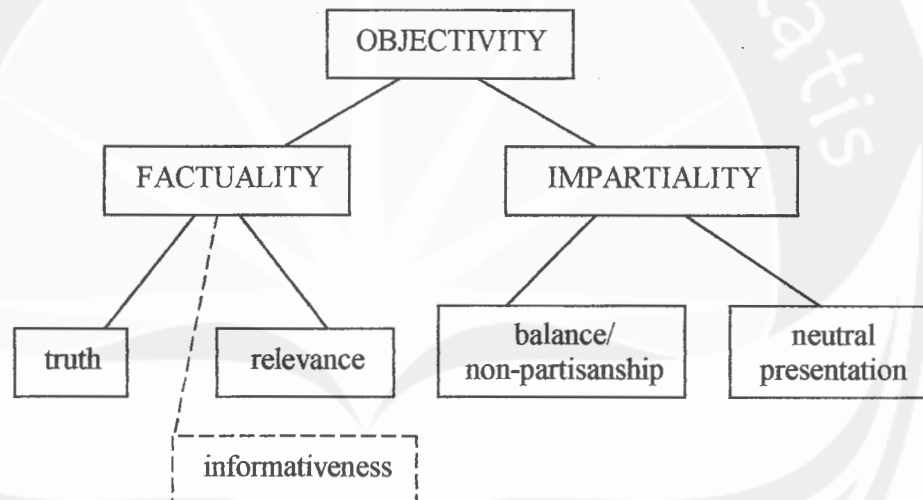
Pers dengan sadar dan atas pilihannya sendiri telah menempatkan diri di tengah ketegangan antara pihak yang memiliki kepentingan dan khalayak sebagai konsumen berita. Dengan posisinya itu, pers menanggung kewajiban utama menyampaikan kebenaran, salah satunya melalui sikap tak memihak. Dengan kata lain, pers dituntut menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan yang objektif. Sehubungan dengan hal tersebut, McQuail berpendapat, prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak boleh dianggap remeh, terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi.

Untuk mengukur objektivitas pemberitaan, penelitian ini menggunakan kerangka konsep yang dikemukakan Westerstahl, yang mencantumkan kriteria-

kriteria kebenaran (*truth*), relevansi (*relevance*), netralitas (*neutrality*), dan keseimbangan (*balance*). Seluruh komponen tersebut merujuk pada satu tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai objektivitas dalam sebuah pemberitaan.

Skema objektivitas Westerstahl membagi objektivitas ke dalam dua dimensi, yaitu *factuality* dan *impartiality*. *Factuality* merupakan dimensi kognitif atau kualitas informasi pemberitaan, sedangkan *impartiality* adalah dimensi evaluatif pemberitaan.

SKEMA 1.1
Skema objektivitas Westerstahl (1983)



Sumber: McQuail, 1992: 196

Factuality dikaitkan dengan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar. Dimensi *factuality* mempunyai dua subdimensi, yaitu kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*).

Truth adalah reliabilitas (keterandalan) fakta yang disajikan. Artinya bahwa fakta-fakta yang dihimpun oleh wartawan benar-benar berangkat dari peristiwa yang terjadi, dan benar-benar ada. *Truth* dapat ditentukan oleh *factualness* yaitu pemisahan antara fakta dan opini, *accuracy* yaitu kecermatan data yang diberikan (seperti nama, angka, tempat, waktu, dll), dan *completeness* yaitu kelengkapan data (McQuail, 1992: 197). Dalam kajian jurnalistik, *truth* (kebenaran) berarti bahwa berita harus bersifat faktual, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mengacu pada prinsip *truth*, misalnya dalam memberitakan kontroversi Resolusi PBB, wartawan tidak dibenarkan memberikan opini pribadinya karena dukungannya terhadap salah satu pihak. Wartawan harus menghimpun fakta yang benar-benar ada sesuai dengan kejadian dan memberitakannya secara lengkap. Pencantuman nama narasumber, jabatannya, tempat kejadian, dan waktu terjadinya peristiwa harus lengkap dan ditulis dengan tepat.

Relevance (relevansi) mensyaratkan perlunya proses seleksi yang dilaksanakan menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan calon penerima dan masyarakat. Relevansi lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun demikian, pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses seleksi, bukan dengan bentuk atau penyajian. Menurut McQuail (1992), relevan atau tidaknya aspek-aspek realitas yang diberitakan bisa ditentukan dengan *normative standards*, *real world indicators*, *audience*, dan *journalistic*. Berita yang menggunakan aspek relevansi adalah berita yang memuat unsur-unsur yang saling berkaitan. Judul, aktor, dan permasalahan yang digali saling berkaitan dan merujuk kepada fokus berita.

Misalnya berita mengenai keputusan penetapan Resolusi 1747 untuk Iran. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip *relevance*, fokus berita harus berada pada bahasan mengenai keputusan penetapan Resolusi, begitu pula dengan judul. Judul harus menggambarkan isi berita, yaitu mengenai keputusan penetapan Resolusi. Aktor atau narasumber yang dimuat harus berkaitan dengan masalah yang diangkat, dalam hal ini misalnya wakil dari Dewan Keamanan PBB, anggota-anggota Dewan Keamanan PBB, atau bisa juga dari pihak Iran, yaitu Presiden Iran. Pada akhirnya, keseluruhan isi berita saling berkaitan, baik dari judul, fokus, maupun aktor berita.

Dimensi kedua, yaitu *impartiality*, berkaitan dengan sikap wartawan yang menjauhkan sikap pribadi atau personal dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Dalam memproses fakta menjadi berita, evaluasi subjektivitas wartawan (penilaian, interpretasi, dan opini pribadi) harus dihindari. Wartawan harus memisahkan antara opini dengan fakta. *Impartiality* ini meliputi sikap seimbang yang berkait dengan pemberian ruang, waktu, dan penekanan proporsional oleh media. Selain itu juga meliputi sikap netral dalam penyajian antara pro dan kontra. *Impartiality* mempunyai dua subdimensi, yaitu *balance* dan *neutral presentation (neutrality)*.

Balance (keseimbangan) sering diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyamakan *balance* dengan ketidakberpihakan atau *non-partisanship* media dalam penyajian sebuah berita. Dalam kaitan ini, McQuail membedakan *balance* dengan netralitas (McQuail, 1992:223). Menurut McQuail, *balance* berhubungan dengan seleksi dan substansi

berita, sedangkan netralitas berhubungan dengan presentasi berita tersebut. *Balance* menghendaki adanya pemberian perhatian yang sama untuk tokoh/pelibat utama atau pemberian perhatian yang seimbang terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa. *Balance* mensyaratkan adanya *equal or proportional access* yakni pemberian akses, kesempatan yang sama kepada semua aktor yang terlibat dan *even-handed evaluation* yakni pemilihan penilaian negatif dan positif yang berimbang untuk semua pihak yang diberitakan dalam setiap pelaporan berita. Pemberitaan mengenai kontroversi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan adanya Resolusi PBB untuk Iran tentu menyiratkan adanya pihak yang pro dan pihak yang kontra. Pers, dalam hal ini, tidak dibenarkan untuk memberi porsi lebih besar kepada pihak yang pro dan porsi yang lebih kecil untuk pihak yang kontra, begitu pula sebaliknya. Pemberian porsi yang sama untuk kedua belah pihak akan memberikan pemberitaan yang berimbang.

Neutral presentation berarti bahwa berita harus bersifat netral, tidak condong kepada suatu pihak. *Neutral presentation* berkaitan dengan penyajian, dan ditentukan dengan penyajian yang non-evaluatif dan non-sensasional. Beberapa hal, seperti penempatan, keutamaan relatif, *headlining*, dan pilihan kata merupakan bagian dimensi netralitas sebuah berita. Secara umum, terlepas dari siapa yang diuntungkan dan dirugikan, objektivitas mensyaratkan pemberitaan yang tenang, dingin, terkendali, dan berhati-hati (Rahayu, 2006:24). Jika prinsip *balance* mensyaratkan pemberian akses yang berimbang untuk yang pro maupun yang kontra, prinsip *neutral presentation* meminta pemberitaan yang tidak memihak. Artinya tidak memihak kepada yang pro dengan Resolusi 1747, dan

juga tidak memihak kepada yang kontra Resolusi. Pers berdiri di tengah, diantara yang pro dan yang kontra, tanpa memihak kepada salah satu diantaranya.

Penggunaan konsep objektivitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media bersikap objektif. Berdasarkan konsep objektivitas yang dikemukakan Westerstahl, peneliti akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam objektivitas diterapkan dalam isi berita yang terdapat dalam pemberitaan kontroversi dalam negeri mengenai Resolusi 1747 yang dijatuhkan kepada Iran pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Bulan Maret-Juli 2007.

2. Konstruksi Realitas Media

Pada dasarnya berita merupakan laporan dari peristiwa. Peristiwa di sini adalah realitas atau fakta yang diliput oleh wartawan dan pada gilirannya akan dilaporkan secara terbuka melalui media massa. Dengan demikian, dapat pula dikatakan secara sederhana, bahwa dalam suatu proses jurnalisme, upaya menceritakan kembali suasana atau keadaan, orang, dan benda, bahkan pendapat yang terdapat dalam sebuah peristiwa merupakan upaya untuk merekonstruksikan realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa, seperti wartawan, editor, redaktur, redaktur pelaksana, dan juga pemimpin redaksi adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi surat kabar atau majalah merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) (Bharata dalam Birowo, 2004:168). Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama namun dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika

melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, dan diwujudkan dalam sebuah teks berita. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 11).

Dalam pendekatan konstruktivisme, realitas tidak dibentuk secara alamiah, melainkan sesuatu yang dikonstruksi. Jika pendekatan konstruksionis ini digunakan dalam melihat berita, maka tidak akan ada realitas media yang bersifat objektif karena realitas yang hadir dalam media merupakan hasil bentukan atau konstruksi wartawan. Proses pengonstruksian ini akan sangat dipengaruhi oleh kerangka ideologis, nilai, afiliasi politik, dan kepentingan wartawan. Akibatnya, suatu realitas yang sama menjadi sangat mungkin dikonstruksi secara berbeda oleh wartawan atau media yang berbeda. Dengan demikian, hasilnya juga berbeda.

Pemahaman bahwa berita merupakan sebuah hasil konstruksi telah membuat objektivitas menjadi konsep yang sulit untuk diraih. Keerbatasan *space* yang disediakan oleh media membuatnya hampir tidak pernah tuntas dalam mendiskusikan berbagai persoalan krusial. Akibatnya, sering terjadi, media gagal merepresentasikan pandangan-pandangan yang beragam dalam pemberitaan. Sementara itu, objek yang berusaha untuk direfleksikan oleh media bukanlah objek pasif. Sebaliknya, mereka mempunyai kepentingan, mempunyai kekuasaan yang secara relatif berbeda, dan menikmati hubungan-hubungan “khusus” dengan para

pemproduksi berita, dimana mereka secara aktif mempengaruhi isi berita. Oleh karenanya, berita lebih merefleksikan citra aktor-aktor yang berkuasa dibandingkan dengan merefleksikan realitas sosial secara keseluruhan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, berita merupakan proses sosial melalui mana para pekerja media membuat keputusan tentang apa yang layak diberitakan dan mana yang tidak, siapa yang penting dan siapa yang tidak, mana yang mesti ditampilkan dan mana yang harus ditinggalkan, dan tidak ada satupun dari keputusan-keputusan ini yang objektif (Rahayu, 2006:xi).

Dalam pembentukan berita itu sendiri, terjadi berbagai proses yang dapat menentukan isi berita. Fishman (dalam Eriyanto, 2002:100-101) berpendapat bahwa terdapat dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut dengan pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Inti dari pandangan ini adalah bahwa proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Setelah berita itu masuk ke tangan redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. Pandangan yang kedua adalah pandangan pembentukan berita (*creation of news*). Pandangan ini berpendapat bahwa peristiwa bukanlah diseleksi, namun dibentuk. Wartawan adalah pembentuk berita; mana yang disebut berita dan mana yang

tidak. Peristiwa dan realitas bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan (Eriyanto, 2002: 100-101).

Mengenai konstruksi realitas, Murray Edelman berpendapat bahwa apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi/menafsirkan realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. Realitas yang dipahami khalayak adalah realitas yang telah diseleksi, khalayak didikte untuk memahami realitas dengan cara tertentu atau dengan bingkai tertentu, bukan cara atau bingkai yang lain (Eriyanto, 2002:155).

Edelman menjelaskan proses konstruksi realitas ini dengan konsep kategorisasi, yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi bisa berarti juga suatu penyederhanaan. Artinya, realitas yang kompleks ditekankan pada satu sisi saja, sehingga fakta atau sisi lain menjadi tidak terliput. Penekanan pada salah satu sisi akan menjadikan fakta yang satu lebih menonjol daripada fakta yang lain. Bahkan realitas pada akhirnya hanya dipahami melalui satu cara pandang tertentu (Eriyanto, 2002:156).

Konsep kategorisasi yang digagas Edelman tidak jauh berbeda dengan konsep yang dipelopori oleh Robert N. Entman. Dalam pandangan Entman, konstruksi realitas dapat dilakukan dengan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang beragam, akan diseleksi aspek-aspek yang layak untuk ditampilkan. Tidak

semua bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari isu. Pemilihan fakta ini menimbulkan akibat yang jauh. Karena begitu fakta didefinisikan maka di sana selalu terjadi proses pemilihan-yang dalam arti tertentu dapat berupa penonjolan dan mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari realitas (Eriyanto, 2002: 199). Sedangkan penonjolan aspek tertentu akan membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

William A. Gamson mempunyai pendapat berbeda mengenai konstruksi realitas. Menurutnya, bagaimana media menyajikan suatu isu menentukan bagaimana khalayak memahami dan mengerti suatu isu. Kemasan atau *package* menentukan bagaimana suatu isu atau peristiwa dijelaskan dan dibentuk oleh khalayak. Wacana media, menurut Gamson, merupakan elemen penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Wacana media adalah saluran individu mengkonstruksi makna, dan pendapat umum adalah bagian dari proses melalui mana wartawan dan pekerja media membangun dan mengkonstruksi realitas yang akan disajikannya ke dalam berita (Eriyanto, 2002:217-218).

Pada akhirnya, media bukanlah sekedar saluran yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

H. Unit Analisis

Penelitian ini membandingkan pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran untuk melihat objektivitas berita di dua surat kabar nasional yaitu Surat Kabar *Harian Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan tersebut. Untuk menganalisis isi berita kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran yang terdapat pada Surat Kabar *Harian Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007, peneliti telah menyusun unit analisis ke dalam beberapa kategori dengan batasan-batasan, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.1
Unit Analisis Objektivitas Berita

NO	Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
1	<i>Truth</i>	Sifat fakta	Fakta sosiologis	
			Fakta psikologis	
		Kelengkapan 5W1H	<i>What</i>	Ada
				Tidak ada
			<i>Who</i>	Ada
				Tidak ada
			<i>Why</i>	Ada
				Tidak ada
			<i>Where</i>	Ada
				Tidak ada
			<i>When</i>	Ada
				Tidak ada
			<i>How</i>	Ada
				Tidak ada

2	<i>Relevance</i>	Nilai berita	Mengarah ke <i>significance</i>	
			Mengarah ke <i>human interest</i>	
		Dimensi pemberitaan	Mengarah ke politik dan pemerintah	
			Mengarah ke agama	
3	<i>Balance</i>	Tipe liputan	Satu sisi	
			Dua sisi	
			Multi sisi	
4	<i>Neutral presentation</i>	Tema berita	Mendukung Resolusi	
			Menolak Resolusi	
			Kombinasi keduanya	

I. Definisi Operasional

Setelah unit analisis diformulasikan, maka unit-unit analisis tersebut akan dicocokkan dengan kategori yang telah dibuat. Berikut ini adalah penjabaran masing-masing unit analisis dan kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat dipakai sebagai pedoman atau tolok ukur dalam melakukan penelitian.

1. *Truth*

Yaitu tingkatan sejauh mana fakta yang disajikan benar atau bisa diandalkan (*reliable*). Dalam penelitian ini, *truth* diukur dengan kategori sifat fakta dan kelengkapan 5W & 1H. Sifat fakta digunakan untuk mengetahui apakah bahan baku berita yang dihimpun wartawan berangkat dari peristiwa nyata atau tidak. Pemberitaan yang objektif meminta fakta yang berangkat dari peristiwa aktual dan benar-benar terjadi. Pemuatan opini wartawan dalam pemberitaan dapat membuat berita menjadi tidak objektif. Sedangkan kategori kelengkapan 5W & 1H digunakan untuk mengukur kelengkapan unsur-unsur informasi dalam suatu berita. Kelima unsur ini harus dipenuhi dalam penulisan berita sehingga berita

yang disajikan menjadi lengkap dan penuh dengan informasi yang berkenaan dengan fakta.

a. Sifat fakta

Yaitu sifat fakta bahan baku berita, yang terdiri dari dua kategori:

- Fakta sosiologis

Adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa atau kejadian nyata/faktual. Fakta sosiologis diperoleh wartawan dari lapangan, sebagai hasil pengamatan tokoh utama atau saksi utama dalam suatu kejadian riil.

- Fakta psikologis

Adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta/gagasan. Fakta sosiologis diperoleh wartawan bukan dari lapangan secara langsung. Fakta ini diungkapkan oleh nara sumber, sebagai pernyataan, opini, contoh, bahkan khalayan.

b. Kelengkapan 5W1H

Untuk melihat apakah media memberikan informasi yang lengkap kepada khalayak dengan mencantumkan semua unsur 5W+1H dalam pemberitaannya.

- *What* (apa)

Jika berita mengandung unsur *what*, yaitu menjelaskan apa yang terjadi menyangkut substansi peristiwa atau pernyataan narasumber

- *Who* (siapa)

Jika berita mengandung unsur *who*, yaitu yaitu menjelaskan dan menyebutkan siapa yang menjadi aktor dalam pemberitaan tersebut,

diidentifikasi dengan nama, umur, profesi, atau atribut lainnya yang melekat pada diri seseorang

- *Why* (mengapa)

Jika berita mengandung unsur *why*, yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa

- *Where* (dimana)

Jika berita mengandung unsur *where*, yaitu menjelaskan dimana tempat terjadinya suatu peristiwa

- *When* (kapan)

Jika berita mengandung unsur *when*, yaitu menjelaskan waktu kejadian atau kemungkinan-kemungkinan waktu yang berkaitan dengan kejadian tersebut, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi

- *How* (bagaimana)

Jika berita mengandung unsur *how*, yaitu menyangkut fakta yang berkaitan dengan proses kejadian yang diberitakan, termasuk didalamnya uraian tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa, bagaimana aktor melakukan suatu perbuatan, bagaimana hasil keputusan suatu perundingan, atau bagaimana menanggulangi suatu peristiwa

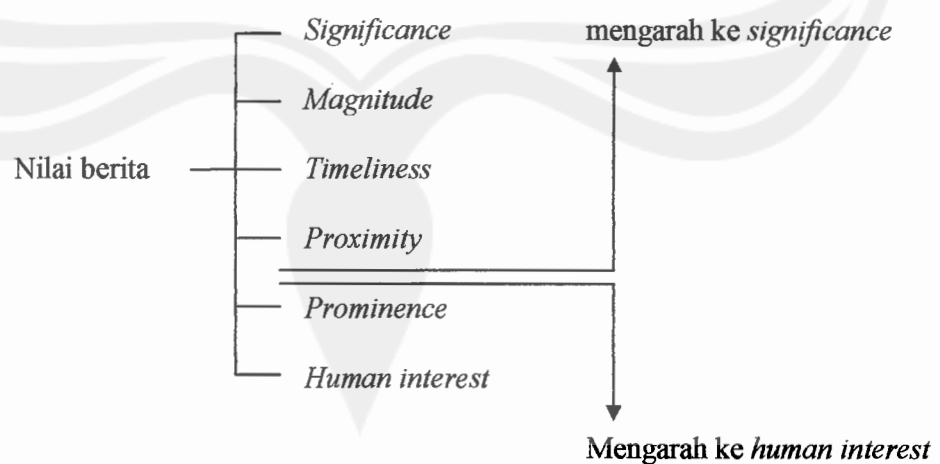
2. *Relevance*

Yaitu untuk meneliti apakah unsur-unsur dan fakta serta data yang disusun dan terdapat dalam berita dapat mencakup informasi yang penting bagi pembaca atau tidak. Dalam penelitian ini, relevansi diukur dengan kategori nilai berita dan

dimensi pemberitaan. Nilai berita berhubungan dengan layak berita. Tidak semua kejadian bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat diberitakan. Kunci utama dalam melihat relevansi media adalah apakah pilihan-pilihan berita yang ditampilkan memenuhi kebutuhan audience. Dalam konteks ini, relevan berarti bahwa berita memang memenuhi kebutuhan informasi audience dan mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan keseharian mereka. Nilai berita atau kelayakan berita dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana berita itu dapat dikatakan penting bagi pembaca.

a. Nilai berita

Nilai berita merupakan kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak menjadi sebuah berita. Semakin lengkap nilai berita yang terkandung di dalamnya, maka peristiwa tersebut semakin layak untuk diberitakan.



- Mengarah ke *significance*

Jika berita mengandung salah satu atau beberapa nilai berita yang mengarah ke *significance*, yaitu *significance*, *magnitude*, *timeliness*, dan atau *proximity*. Semakin berita tersebut mengandung nilai berita yang mengarah ke *significance* maka semakin penting peristiwa tersebut untuk diketahui masyarakat, dan semakin relevan pemberitaan tersebut.

- *Significance*

Berita mengandung nilai *significance* jika peristiwa yang diberitakan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. Contoh: berita Pemilu, kenaikan harga BBM

- *Magnitude*

Berita mengandung nilai *magnitude* jika peristiwa yang diberitakan menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak. Contoh: berita harga sembako, korban kecelakaan, hasil Pemilu, skor pertandingan, hasil polling.

- *Timeliness*

Berita mengandung nilai *timeliness* jika peristiwa yang diberitakan baru saja ditemukan atau baru saja terjadi. Pada umumnya, *timeliness* dihitung maksimal dua hari setelah peristiwa berlangsung.

- *Proximity*

Berita mengandung nilai *proximity* jika peristiwa yang diberitakan menyangkut faktor kedekatan dengan pembaca, seperti faktor geografis atau emosional.

- Mengarah ke *human interest*

Jika berita mengandung salah satu atau beberapa nilai berita yang mengarah ke *human interest*, yaitu *prominence*, dan atau *human interest*. Semakin berita tersebut mengandung nilai berita yang mengarah ke *human interest*, maka semakin kurang penting informasi tersebut bagi pembaca, dan semakin tidak relevan pemberitaan tersebut.

- *Prominence*

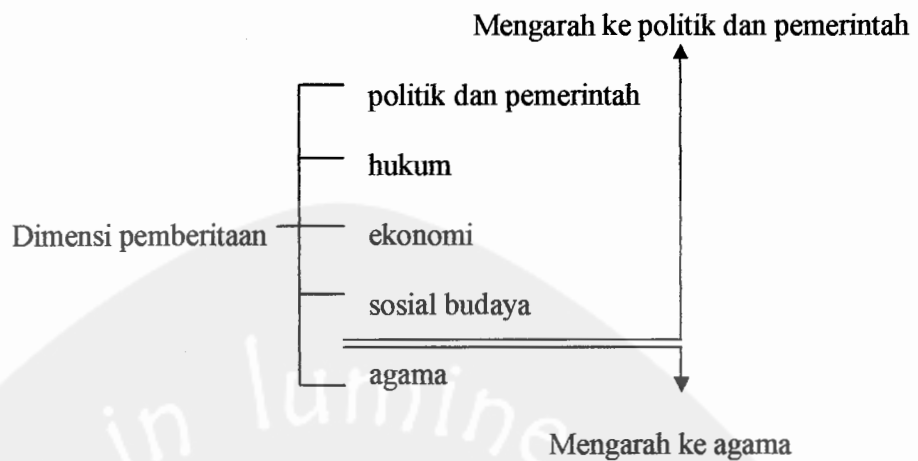
Berita mengandung nilai *prominence* jika pemberitaan menyangkut faktor keterkenalan, hal yang terkenal atau hal yang sangat dikenal oleh pembaca, bisa berupa orang, benda, atau tempat.

- *Human interest*

Berita mengandung nilai *human interest* jika peristiwa yang diberitakan memberi sentuhan perasaan kepada pembaca, mengharukan, bisa juga kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi yang luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

b. Dimensi pemberitaan

Adalah dimensi atau tema pemberitaan yang dapat menggambarkan materi isi yang terkandung dalam sebuah berita. Dalam konteks penelitian ini, semakin materi berita mengarah ke dimensi politik dan pemerintah, maka semakin relevan berita tersebut. Namun semakin materi berita mengarah ke dimensi agama, maka semakin tidak relevan berita tersebut.



- Mengarah ke politik dan pemerintah

Apabila dimensi pemberitaan mengandung satu atau lebih pokok bahasan yang mengarah ke dimensi politik dan pemerintah, yaitu dimensi politik dan pemerintah, dimensi hukum, dimensi ekonomi, dan atau dimensi sosial budaya. Semakin berita mengandung dimensi yang mengarah ke poliik dan pemerintah, maka pemberitaan tersebut semakin relevan

- Politik dan pemerintah

Jika berita menyajikan persoalan yang berhubungan dengan politik dan kegiatan-kegiatan berbagai badan pemerintah yang berkaitan dengan kontroversi Resolusi PBB 1747

- Hukum

Jika pokok bahasan berita menyangkut masalah-masalah pelanggaran hukum dan penerapan hukum, tentunya yang berkaitan dengan kontroversi Resolusi PBB 1747

- Ekonomi

Jika pokok bahasan berita menyangkut masalah-masalah perekonomian, seperti perdagangan, keuangan, perbankan dan industri yang bersangkutan dengan Resolusi PBB 1747 atau terkena dampak dari Resolusi 1747

- Sosial dan budaya

Jika pokok bahasan berita menyangkut masalah sosial dan budaya sebagai akibat dari Resolusi PBB 1747

- Mengarah ke agama

Apabila dimensi pemberitaan mengandung pokok bahasan yang mengarah ke dimensi agama. Semakin berita mengandung dimensi yang mengarah ke dimensi agama, maka pemberitaan tersebut semakin tidak relevan

- Agama

Jika pokok bahasan berita menyangkut masalah agama dalam kaitannya dengan Resolusi PBB 1747

3. *Balance*

Balance menghendaki adanya pemberian perhatian yang sama untuk tokoh/pelibat utama atau pemberian perhatian yang seimbang terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan kategori tipe liputan untuk mengukur *balance*. Penyajian berita dengan informasi berimbang antara pihak satu dengan pihak lainnya akan menjadikan berita tersebut mengandung unsur *balance*.

- Tipe liputan

Yaitu untuk meneliti apakah dalam berita yang mempunyai nilai atau unsur konflik, mampu mencakup keseluruhan sisi yang terlibat atau tidak. Hal ini berkaitan dengan strategi peliputan yang dilakukan oleh wartawan.

a. Satu sisi

Jika pemberitaan hanya menghadirkan liputan dari satu pihak saja, atau dari beberapa pihak namun dengan pendapat atau pandangan serupa.

b. Dua sisi

Jika pemberitaan menghadirkan liputan dari dua sisi. Peristiwa yang diberitakan digali dari kedua belah pihak dengan pendapat atau pandangan yang berbeda sehingga dapat mencegah terjadinya kecenderungan isi berita menjadi bias.

c. Multi sisi

Apabila pemberitaan menghadirkan liputan dari berbagai sisi dengan pendapat atau pandangan dari berbagai pihak yang memungkinkan pemberitaan menjadi lebih objektif.

4. *Neutral presentation*

Neutral presentation berarti bahwa berita harus bersifat netral, tidak condong kepada suatu pihak. Prinsip *neutral presentation* meminta pemberitaan yang tidak memihak. Penelitian ini menggunakan kategori tema berita untuk melihat keberpihakan media pada isu seputar kontroversi Resolusi PBB nomor 1747

▪ Tema berita

Yaitu untuk meneliti bagaimana media melihat peristiwa yang ada, yang ditentukan dari porsi *statement* atau pernyataan yang ada, tampilan, letak *statement*, serta penggunaan kata-kata untuk menggambarkan peristiwa.

a. Mendukung Resolusi

Jika dalam pemberitaan, media mencantumkan pernyataan, sikap, atau kata-kata tertentu yang menggambarkan atau berisi dukungan terhadap Resolusi atau dukungan terhadap keputusan pemerintah yang mendukung Resolusi.

b. Menolak Resolusi

Jika dalam pemberitaan, media mencantumkan pernyataan, sikap, atau kata-kata tertentu yang menggambarkan atau berisi penolakan terhadap Resolusi atau tidak mendukung keputusan Indonesia yang mendukung Resolusi

c. Kombinasi keduanya

Jika media mencantumkan pernyataan, sikap, atau menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan dukungan maupun penolakan dalam satu berita sekaligus

J. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagai metodenya. Para ahli memberikan beragam pendapat mengenai definisi analisis isi. Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1993: 15) Replikabel disini dimaksudkan supaya penelitian dengan metode

analisis isi menghasilkan hasil yang handal (*reliable*), terutama jika peneliti lain, dalam waktu dan keadaan yang berbeda, melakukan penelitian terhadap data yang sama, dengan teknik yang sama pula, maka hasilnya harus sama.

Sedangkan Holsti dan Stone mengemukakan bahwa analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Krippendorff, 1993: 19).

Metode analisis isi mampu menerima bentuk komunikasi simbolik yang tak terstruktur sebagai data, dan menganalisis gejala yang tak teramati (*unobserved*) melalui medium data yang berkaitan dengan gejala tertentu. Analisis isi digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang tampak atau manifest, dan tidak mempedulikan hal yang tidak tampak, dalam hal ini adalah konteks. Objek yang digunakan dalam analisis isi adalah bentuk-bentuk komunikasi yang telah dihasilkan orang, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi itu.

Analisis isi didesain untuk mendapatkan sebuah perhitungan objektif, terukur, dan terverifikasi terhadap isi pesan yang manifest, dengan menganalisis tatanan denotatif penanda (*signification*). Analisis isi sangat baik bila digunakan dalam skala besar, semakin besar unit analisisnya, semakin akurat (Fiske, 1990: 136).

Berelson mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk uraian yang objektif, sistematis, dan kuantitatif dari pengejawantahan isi komunikasi (McQuail, 1991: 179). Sependapat dengan Berelson, Kerlinger juga menyatakan bahwa analisis isi merupakan suatu metode analisis yang sistematis, objektif, dan kuantitatif (Wimmer dan Dominick, 2003: 141).

Karakteristik penelitian dengan metode analisis isi meliputi :

a. Prinsip sistematis

Prinsip sistematis berarti bahwa ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Peneliti tidak dibenarkan melakukan analisis hanya pada isi yang sesuai dengan minatnya. Peneliti harus melakukan analisis pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan.

b. Prinsip objektif

Prinsip objektif merujuk pada hasil penelitian, bukan pada peneliti. Dimana penelitian menunjukkan hasil yang sama apabila dilakukan dengan isi dan prosedur yang sama, walaupun peneliti berbeda.

c. Prinsip kuantitatif

Tujuan analisis isi adalah memperoleh gambaran yang akurat dari suatu pesan komunikasi. Unsur kuantitatif sebagai ciri analisis isi dapat dilihat dari hasil yang diwujudkan dalam bentuk angka, berupa distribusi frekuensi, tabel kontingensi, atau lainnya.

Tujuan utama penelitian dengan teknik analisis isi adalah mendeskripsikan pesan yang ada dalam ranah publik dengan perantaraan teks. Desain penelitian dengan teknik ini dapat pula digunakan untuk mendeskripsikan fenomena komunikasi (Putranto dalam Birowo, 2004:150)

Penelitian ini bersifat deskriptif, terutama untuk mendeskripsikan bagaimana *Kompas* dan *Republika* meramu prinsip objektivitas dalam pemberitaan kontroversi seputar Resolusi DK PBB nomor 1747. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai variabel yang timbul

di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2005: 36).

Peneliti meletakkan konsep dasar penelitian ini pada konsep kuantitatif dan kualitatif dengan metode *comparative content analysis research*, yaitu membandingkan objek penelitian yang satu dengan yang lain. Peneliti mengkomparasikan atau membandingkan pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran untuk melihat objektivitas berita di dua surat kabar nasional yaitu Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007. Penelitian ini diharapkan mampu melihat perbedaan antara kedua media tersebut dalam meramu unsur objektivitas berita ketika keduanya mengupas isu yang sama.

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan penelitian. Tahap pertama adalah merumuskan masalah. Penelitian dengan teknik analisis harus spesifik dalam perumusan masalahnya. Hal ini dikarenakan teknik analisis isi relatif sempit dalam kajiannya, sehingga perumusan masalah harus dibuat spesifik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan seputar Resolusi DK PBB yang dijatuhkan kepada Iran di Harian *Kompas* dan *Republika*.

Langkah selanjutnya adalah penentuan unit analisis. Unit analisis bisa berupa gambar, judul, kalimat, paragraph atau keseluruhan isi teks berita. Dalam penelitian ini, unit analisis yang akan diteliti adalah teks berita, khususnya teks berita yang memuat pemberitaan seputar kontroversi yang terjadi di dalam negeri mengenai Resolusi DK PBB nomor 1747 di Surat Kabar *Kompas* dan *Republika*.

Setelah unit analisis ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pengembangan dan penetapan konstruksi kategori. Konstruksi kategori digunakan sebagai indikator dalam mengklasifikasi pesan komunikasi yang diteliti (Putranto dalam Birowo, 2004: 153). Masing-masing unit analisis dan kategori dijabarkan dan diberi batasan-batasan yang jelas dalam definisi operasional agar dapat dipakai sebagai pedoman atau tolok ukur dalam penelitian ini.

Selanjutnya adalah tahap penarikan sampel. Penarikan sampel dilakukan setelah peneliti menentukan satuan unit analisis dan menetapkan konstruksi kategorinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi pada teks media. Data yang telah terkumpul akan dianalisis satu persatu dengan mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan, serta dimasukkan ke dalam lembar coding untuk dijumlah dan diprosentase menggunakan distribusi frekuensi. Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan melalui lembar coding, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

Selanjutnya hasil penelitian diuraikan secara kualitatif guna membahas sejauh mana media bersikap objektif dalam pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran berita pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007

K. Objek dan Sampel Penelitian

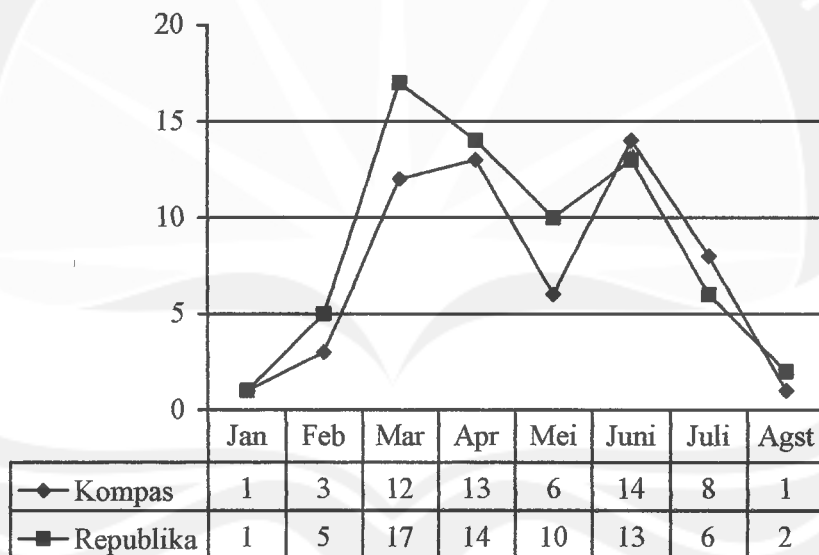
Untuk menentukan item berita yang dipilih, maka teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Penggunaan *purposive sampling* dimulai sejak penentuan objek penelitian, penentuan media yang diteliti, dan juga penentuan time frame.

Berdasarkan teknik tersebut, maka objek penelitian hanya berita yang memuat kontroversi Resolusi 1747 yang terjadi di Indonesia selama periode Maret-Juli 2007 di dua surat kabar nasional, yaitu *Kompas* dan *Republika*. Berita-berita tersebut dikumpulkan dan kemudian diobservasi. Berita-berita yang terkait dengan penelitian disebut data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah, baik dari buku-buku, koran, maupun tulisan-tulisan pada situs internet.

Pemilihan periode Maret-Juli 2007 disesuaikan dengan waktu sejak dikeluarkannya draft Resolusi oleh Dewan Keamanan PBB hingga pengambilan keputusan mengenai interpelasi Resolusi Iran di sidang paripurna DPR-RI. Selama tenggang waktu tersebut terjadi berbagai peristiwa kontroversi seputar

dukungan Indonesia terhadap Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tersebut. Selain itu, pemilihan periode Maret-Juli 2007 juga berdasarkan tingginya jumlah pemberitaan di kedua surat kabar, yakni *Kompas* dan *Republika*, tentang Resolusi 1747 dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya maupun sesudahnya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jumlah pemberitaan di kedua surat kabar selama periode Januari-Agustus 2007, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.1
Grafik perbandingan pemberitaan tentang Resolusi Iran nomor 1747 di *Kompas* dan *Republika* periode Januari-Agustus 2007



Pemilihan *Kompas* dan *Republika* sebagai objek penelitian adalah karena kedua media tersebut merepresentasikan pers Indonesia. Kedua media, yakni *Kompas* dan *Republika*, tergolong media dengan sirkulasi besar. *Kompas* adalah harian nasional dengan oplah dan sirkulasi terbesar di Indonesia. Menurut David

T.Hill, Kompas menduduki peringkat kedua di seluruh Asia Tenggara dengan jumlah pembaca terdidik 3.120.000 di seluruh Indonesia (Hill,1995:83). Ben Anderson mengelompokkan Kompas sebagai surat kabar orde baru paling berpengaruh. Kompas mendominasi pasar kelas menengah dan atas, mempunyai pelanggan yang kuat dan loyal (Hill,1995:84). Sedangkan Republika merupakan surat kabar yang mempunyai sebaran luas dan mencakup skala nasional. Pembaca Republika adalah para profesional, enterpreneur, karyawan, pelajar/mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dengan besarnya skala distribusi dan pembaca yang terdidik, maka Kompas dan Republika dituntut untuk memberikan sajian yang berkualitas. Pemilihan kedua media juga dilandasi oleh pemikiran berdasarkan karakteristik Kompas dan Republika. Kompas dan Republika mempunyai perbedaan latar belakang secara historis. Republika lahir dari ICMI dan dapat dikatakan berideologi Islam, sedangkan Kompas lahir dari partai Katolik sehingga dapat dikatakan berideologi Katolik, walaupun pada akhirnya Kompas memutuskan afiliasinya dengan partai Katolik. Pembaca yang dituju oleh Republika adalah umat Islam di Indonesia, sedangkan pembaca yang dituju Kompas lebih beragam. Berdasarkan latar belakang historis dan perbedaan sasaran pembaca, maka Republika yang dikategorikan sebagai surat kabar Islam (Hill, 1995:126) akan menaruh perhatian yang lebih besar terhadap pemberitaan kontroversi tentang Resolusi Iran untuk menunjukkan empati terhadap negara Iran yang disebut-sebut sebagai sesama negara Islam. Sedangkan Kompas akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan mengenai kontroversi Resolusi Iran karena menyadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

L. Uji Reliabilitas Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel, maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas memunculkan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Secara sederhana prinsip dari uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodean diantara kedua pengkode, maka semakin reliabilitas kategori yang telah disusun.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan. Maka dipakai metode *intercoder reliability* menggunakan formula Holsti dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan yaitu:

$$\text{Reliability/CR} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

M = jumlah pernyataan yang disetujui kedua pengkode

N1N2 = jumlah pernyataan yang dikode oleh pengkode pertama
pengkode kedua

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott, yaitu:

$$pi = \frac{\% \text{ persetujuan yang nyata} - \% \text{ persetujuan yang diharapkan}}{1 - \% \text{ persetujuan yang diharapkan}}$$

Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan melalui lembar koding, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

Selanjutnya hasil penelitian diuraikan secara kualitatif guna membahas bagaimana media bersikap objektif dalam pemberitaan kontroversi publik dalam negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 mengenai sanksi atas Iran berita pada Surat Kabar Harian *Kompas* dan *Republika* periode Maret-Juli 2007